

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Diviana et al (2020) bertujuan untuk menyusun laporan keuangan Masjid Baitul Haadi berdasarkan ISAK 35 yang berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan alat bantu Microsoft Excel. Metode analisis yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 dapat menyajikan perubahan aset neto, dan menyajikan naik turunnya aset neto selama periode tertentu, sehingga bisa dijadikan sebagai penilaian kinerja Masjid Baitul Haadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuarisa (2020) bertujuan untuk mengetahui fenomena akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya periode pengamatan tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang telah dibuat, yang menyatakan adanya pertanggungjawaban kepada pihak Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu. Makna pelayanan kedukaan kepada keluarga duka menunjukkan akuntabilitas secara horizontal oleh pengurus yayasan kepada Gereja dan warga Gereja sebagai rekan kerja dalam pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghassani et al (2020) bertujuan untuk menganalisis bentuk Laporan Keuangan di Masjid Madinatul Munawaroh serta menganalisis Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Masjid Madinatul Munawaroh. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian pada masjid ini belum

menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Laporan keuangan Masjid Madinatul Munawaroh hanya mencakup laporan pemasukan dan pengeluaran saja tanpa dikelompokkan berdasarkan akunnya serta masih menggunakan bahasa sendiri. Berdasarkan hasil analisis Interpretasi, Masjid Madinatul Munawaroh perlu menerapkan standar akuntansi entitas nonlaba berdasarkan ISAK 35 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Karena jika laporan keuangan disajikan berdasarkan ISAK 35 akan membuat para donatur dan masyarakat sekitar percaya dengan pengalokasian dana dan pertanggungjawaban dana yang dikelola dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Shoima et al (2021) bertujuan untuk menganalisis dan mengadaptasi pelaporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan/ ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus di Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Hasil dari penelitian ini, perlu dilakukan perubahan metode pencatatan berbasis akrual dengan sistem double entry, penyusunan jurnal penyesuaian untuk penyusunan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Adaptasi laporan keuangan Universitas Ibrahimy dilakukan dengan menyesuaikan pos akun yang diperlukan oleh Universitas Ibrahimy dengan pos akun yang tercantum dalam ISAK 35.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwikasmanto (2020) bertujuan untuk mengetahui analisis laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis sesuai dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan berorientasi nonlaba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, laporan keuangan yang dibuat hanya mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman et al (2016) bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tahapan penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK 45, untuk melihat kesesuaian item pernyataan pada

setiap paragraf dalam PSAK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba yang disusun oleh LSM PKBI Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK No. 45 secara keseluruhan, laporan keuangan yang disusun terdiri dari tiga jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan kegiatan dan laporan arus kas, dimana masih ada kelompok aktiva bersih yang belum dipisahkan di dalam laporan keuangan yang telah diatur PSAK No. 45.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Setyohadi (2017) bertujuan untuk membandingkan proses manual dengan model perangkat lunak yang dapat mengimplementasikan standar pencatatan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, proses atau tahapan siklus akuntansi secara manual atau tertulis tidak banyak berbeda dengan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Masalah yang sering dihadapi oleh organisasi nirlaba adalah keterbatasan pengetahuan tentang Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 45, dimana itu bisa diatasi dengan sistem informasi akuntansi yang dimiliki dan telah disesuaikan dengan standar PSAK 45. Sistem informasi akuntansi menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien serta laporan keuangan lebih akurat dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri dan Saputra (2019) bertujuan untuk membantu keuangan Pondok Pesantren Al-Karomah Malang dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dengan menggunakan aplikasi SANGO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan laporan keuangan yang dilakukan hanya sebatas rekapitulasi kas masuk dan kas keluar tiap bulan, serta laporan kas tahunan yang merupakan akumulasi laporan bulanan selama setahun. Maka, peneliti dan pengelola pondok pesantren menyusun rencana agar pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku yaitu dengan menggunakan aplikasi SANGO. Dengan menggunakan aplikasi SANGO, pencatatan setiap proses transaksi baik tunai, non tunai dan pencairan uang di Pondok Pesantren Al Karomah Malang bisa dibilang bagus, meski

masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Entitas Berorientasi Nonlaba

Entitas berorientasi nonlaba merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari individu maupun kelompok yang bertujuan memberi layanan sosial pada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan dari kegiatan yang telah dilakukan. Entitas berorientasi nonlaba memiliki nama lain yang disebut entitas nirlaba atau organisasi non-profit. Istilah entitas berorientasi nonlaba digunakan setelah pencabutan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba dan penerbitan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Entitas berorientasi laba dan entitas berorientasi nonlaba memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu cara memperoleh sumber dana yang akan digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan operasionalnya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber dana dari penyedia sumber dana yang tidak menginginkan keuntungan dari apa yang telah diberikan. Sehingga dapat disimpulkan, entitas berorientasi nonlaba adalah entitas yang dibentuk secara sukarela yang tujuannya tidak untuk memperoleh keuntungan. Sumber daya entitas nonlaba berasal dari sumbangan atau donasi anggota dan donatur yang tidak mengharapkan imbalan.

2.2.2. Perbedaan Entitas Berorientasi Nonlaba dengan Entitas Lain

Perbedaan entitas berorientasi nonlaba dengan entitas lain secara garis besar, sebagai berikut :

1. Kepemilikan

Tidak ada kejelasan pada pemilikan entitas berorientasi nonlaba. Pada entitas berorientasi laba, kepemilikan jelas mendapatkan keuntungan dari hasil usaha entitasnya. Dalam entitas berorientasi nonlaba, klien yang seharusnya menerima keuntungan dan manfaat dari organisasi tersebut.

2. Dua Penentu

Pada entitas berorientasi laba, pelanggan atau konsumen menjadi sumber pendapatan karena pertukaran barang atau jasa dengan uang. Entitas berorientasi nonlaba juga memiliki pelanggan, tetapi mereka tidak membayar atas jasa yang diterimanya. Oleh karena itu, entitas berorientasi nonlaba biasanya memiliki sumber dana khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut.

3. Donatur

Keberadaan donatur sebagai sumber pendanaan bagi entitas berorientasi nonlaba setidaknya menunjukkan bahwa banyak orang atau entitas yang tepercaya berhak memutuskan atau mempengaruhi misi, tujuan, dan hasil kerja entitas yang bersangkutan baik karena mereka mampu atau tidak.

4. Keberhasilan dan Kelangsungan Hidup

Dalam entitas berorientasi nonlaba, keberhasilan dan keberlangsungan hidup diartikan sebagai kemampuan entitas dalam memberikan pelayanan terbaik yang dapat memuaskan konsumen atau pelanggan.

5. Permintaan Selalu Melebihi Penawaran

Untuk entitas berorientasi nonlaba, hukum permintaan dan penawaran pasar adalah berbanding terbalik. Entitas berorientasi nonlaba sering menghadapi jumlah permintaan pelanggan atau konsumen jauh melampaui apa yang bisa disediakan

6. Penugasan Tanggung Jawab

Tanggungjawab setiap pekerjaan dalam entitas berorientasi nonlaba telah ditentukan dengan jelas sebelumnya. Dalam entitas berorientasi nonlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota dewan pengurus bukanlah pemilik entitas. Beberapa anggota pengurus sering menganggap diri mereka sebagai manajer, sementara itu beberapa orang staff dan sukarelawan juga sering menganggap diri mereka sebagai anggota pengurus.

7. Sukarelawan

Keberadaan relawan di entitas berorientasi nonlaba merupakan kekuatan tersendiri, tetapi juga menjadi masalah tersendiri. Keuntungannya terletak pada motivasi dan dedikasi mereka yang biasanya sangat tinggi disamping biaya yang rendah. Permasalahannya terletak pada perasaan seolah-olah mereka memang "disukarelawan".

8. Motivasi

Sebagian besar entitas berorientasi nonlaba sangat mementingkan karyawan mereka yang memiliki motivasi tinggi, yang lebih didorong oleh dedikasi daripada keinginan untuk upah yang memadai. Motivasi dan dedikasi yang tinggi ini dapat menjadi sumber frustrasi bagi para manajer entitas berorientasi nonlaba, karena karyawan telah banyak berkorban untuk entitas, dan mereka sering merasa bahwa wajar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam menentukan misi dan tujuan entitas dan bagaimana untuk melayani entitas.

9. Sistem Tugas yang Tidak Jelas

Hanya sedikit orang di entitas berorientasi nonlaba yang memiliki pemahaman yang jelas tentang cara paling efektif untuk memberikan layanan. Cara mereka bekerja tidak jelas dan tidak stabil. Ketika pekerjaan berjalan dengan baik, sulit untuk menentukan mengapa hal itu terjadi. Sebaliknya, jika ada kegagalan, sulit dikatakan apakah itu akibat dari campur tangan dari kita atau bukan.

10. Lingkungan yang Majemuk dan Dinamis

Lingkungan kerja entitas berorientasi nonlaba saat ini semakin beragam dan terus berubah. Hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui hal ini atau merasa mampu menanganinya. Sebagian besar masalah yang dihadapi oleh entitas berorientasi nonlaba adalah bagaimana meningkatkan standar dan kualitas hidup.

2.2.3. Macam-macam Entitas Berorientasi Nonlaba

Sebagai entitas berorientasi nonlaba, dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Yayasan

Yayasan adalah entitas berorientasi nonlaba yang berbentuk badan hukum yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Seperti yang telah ditulis dalam KUHP Perdata Pasal 1653, Eksistensi Badan Hukum di Indonesia digolongkan menjadi tiga yaitu :

- 1) Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu untuk kepentingan negara dalam mengelola pemerintahan.
- 2) Badan hukum yang diakui oleh pemerintah untuk tujuan memperoleh keuntungan melalui aktivitas tertentu.
- 3) Badan hukum yang diizinkan untuk tujuan tertentu, seperti yayasan sosial, agama dan kemanusiaan.

Berdasarkan UU No. 16/2001, ada tiga bagian yang memiliki tanggungjawab atas pengelolaan sebuah yayasan yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Prosedurnya, pembina, pengawas dan pengurus tidak berhak atas dana yang dimiliki oleh yayasan, kecuali pengurus yang tidak ada hubungannya dengan pendiri, pembina dan pengwasan yayasan bisa mendapatkan gaji atau honorarium.

Pembina adalah perseorangan yang berkedudukan sebagai penggagas yayasan sesuai keputusan rapat anggota pembina., dinilai mampu dan memenuhi syarat dalam mewujudkan visi yayasan. Pengawasan adalah perseorangan yang ditugaskan untuk mengawasi pengurus dan memberikan arahan kepada pengurus dalam proses optimalisasi kegiatan. Sedangkan, pengurus adalah perseorangan yang menjalankan kepengurusan yayasan. Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 UU Yayasan, susunan pengurus dalam yayasan harus terdiri dari ketua yayasan, sekretaris, dan bendahara. Prosedurnya, seorang pengurus merupakan meraka yang dianggap andal dalam perbuatan hukum. Periode seorang pengurus adalah dua periode, dengan masa jabatan lima tahun per periode. Ada beberapa tipe yayasan yang berkembang di Indonesia, yaitu :

- 1) Tipe pertama adalah yayasan yang mengatur kegiatan soasial dan keagamaan secara langsung, seperti mendirikan sebuah instusi pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Dimana, jika yayasan menerima kelebihan hasil, kelebihan dana tersebut akah digunakan untuk operasional yayasan.
- 2) Tipe kedua adalah yayasan hanya berfokus pada pengumpulan yang akan disumbangkan kepada organisasi-organisasi sosial, seperti panti asuhan, rumah sakit dalam bentuk beasiswa.
- 3) Tipe ketiga adalah yayasan yang mendirikan perseoran terbatas untuk menjalankan bisnis-bisnis dari yayasan seperti, pabrik dan usaha lainnya yang menghasilkan laba. Hasil laba dari kegiatan usaha teresbut akan di donasikan untuk kegiatan sosial.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Secara umum, ada dua jenis organisasi kemasyarakatan di Indonesia yaitu organisasi kemasyarakatan sesuai nasionalisme-sekuler dan nasionalisme-religius. Ada beberapa organisasi kemasyarakatan, yaitu karang taruna, posyandu, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dewan Kelurahan. Sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Front Pembela Islam (FPI), dan lain-lain.

Beberapa tugas yang ada harus dilakukan oleh tim organisasi kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : PHN-29.LT.02.01 Tanggal 01 April 2011 mengenai Pembentukan Tim Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- a. Mengidentifikasi segala permasalahan hukum
- b. Mempelajari dan menganalisis
- c. Memberikan saran, upaya serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang baik dan sistematis.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan aspirasi dan hak warga negara, organisasi kemasyarakatan tidak boleh adanya unsur politik sekecil apapun dalam kegiatannya. Jika ada bantuan dana atau materi dari pemerintah, maka tidak

diperbolehkan anggota organisasi yang menjabat sebagai anggota pemerintahan.

Berdasarkan dengan UU No. 17 Tahun 2013 Pasal 6 Tentang Fungsi Ormas, yaitu :

- a. Pemberdayaan masyarakat
 - b. Fasilitas yang mendukung masyarakat dalam membangun, menjaga, dan memperkuat persatuan
 - c. Penyalur aspirasi masyarakat
 - d. Media pengembangan dan bimbingan kepada anggota untuk mencapai tujuan organisasi
 - e. Pemelihara norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara
3. Perkumpulan

Perkumpulan adalah persekutuan, sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dalam bidang non ekonomis, kemudian bekerjasama dan dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada beberapa persyaratan penting untuk mendirikan suatu perkumpulan, antara lain memiliki kekayaan sendiri (kekayaan yang terpisah dari pendiri), organisasi yang terstruktur akan membentuk perkumpulan memiliki tujuan yang ideal.

Secara struktur, sistem perkumpulan sudah ditetapkan pembagian keanggotaan, berbeda dengan yayasan yang tidak memiliki struktur keanggotaan permanen. Ada dua jenis perkumpulan yang kini berkembang di Indonesia yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan non badan hukum. Pada dasarnya, keduanya masih diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan juga Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1870 tentang Kedudukan Badan Hukum, yang dibuat pada masa kolonial dan transisi Hindia Belanda.

Berikut merupakan perbedaan perkumpulan berbadan hukum dan perkumpulan non berbadan hukum :

1) Perkumpulan Berbadan Hukum

Kebutuhan untuk menjadi badan hukum adalah sebuah pilihan dari suatu perkumpulan. Tidak semua perkumpulan harus berbadan hukum, namun status badan hukum sebagai bentuk pengakuan akan lebih memudahkan perkumpulan melakukan kegiatan yang bersifat hukum, seperti memberikan hak untuk memiliki saham atau

surat berharga, rekening bank atas nama perkumpulan, dan mempunyai hak tanah atas nama perkumpulan.

Untuk mendapatkan status badan hukum, perkumpulan harus melakukan pendaftaran secara resmi di instansi pemerintah. Ada tiga proses untuk menjadikan perkumpulan sebagai badan hukum, yaitu melakukan pendaftaran sebagai badan hukum, melakukan pendaftaran untuk izin operasional, dan standarisasi dan akreditasi dalam rangka pembinaan mutu.

2) Perkumpulan Non Berbadan Hukum

Sejak awal berdirinya perkumpulan ini, perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat melalui proses yang tidak terlalu rumit dengan yang berbadan hukum. Proses perizinannya cukup mudah, karena tidak perlu izin resmi Kementerian Hukum dan HAM melainkan bisa melalui notaris untuk memperoleh akta pendirian dan kemudian didaftarkan pada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan aktivitasnya, ada batasan-batasan dalam perkumpulan non berbadan hukum yaitu tidak boleh melakukan kegiatan sipil dan mengelola aset tetap.

Sebagai entitas atau ruang yang melibatkan beberapa pihak dan memikul tanggungjawab besar, perkumpulan mempunyai tata kelola organisasi yang tidak bisa dihindari. Tata kelola dalam perkumpulan akan lebih fokus pada kemandirian, pengembangan, dan pemberdayaan untuk menciptakan sumber daya yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Dalam suatu perkumpulan terdapat pengaturan perumusan norma mengenai sumber kekayaan dapat bersumber dari pemberian yang bersifat tidak mengikat, hibah, iuran anggota, dan penerimaan lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dengan tidak melibatkan banyak oknum politik supaya bisa tetap menjaga keseimbangan visi dan misi suatu perkumpulan.

2.2.4. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Nonlaba (ISAK) No.

35

ISAK 35 adalah standar akuntansi keuangan yang baru disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga menerbitkan PPSAK 13 yang berisi pencabutan PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nirlaba. Berdasarkan DE ISAK 35, yang merupakan ruang lingkup bagi entitas berorientasi nonlaba untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku ialah yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Sumber daya entitas berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menghasilkan laba, dan jika entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dengan arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Dalam ISAK 35, laporan keuangan berisi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam ISAK 35 terdapat laporan penghasilan komprehensif yang digunakan untuk klasifikasi aset neto yang terbagi menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Entitas berorientasi nonlaba juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri. Misalnya, penyesuaian atas penggunaan judul “laporan perubahan aset neto’ daripada “laporan perubahan ekuitas.” Tidak ada batasan untuk penyesuaian judul laporan keuangan selama penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan.

2.2.5. Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35

Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1 : *Penyajian Laporan Keuangan*. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi terkait dengan kinerja keuangan entitas, posisi keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba diantaranya merupakan donatur, pemerintah, kreditur, otoritas pengawasan, anggota organisasi, masyarakat. Laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35, sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Bertujuan untuk memberikan informasi tentang aset, liabilitas dan aset neto dalam periode tertentu. Laporan ini dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu para pemberi dana, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain menilai :

- a. Kemampuan entitas dalam memberikan jasa secara berkelanjutan, dan
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas dan aset neto.

A. Aset

Memiliki nilai ekonomis serta menunjang aktivitas entitas dapat dihitung secara nominal, bila memperoleh dan menghitung nilai wajarnya berdasarkan kondisi objektif. Penyajian aset terdiri dari :

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang
- 3) Persediaan
- 4) Sewa

B. Liabilitas

Liabilitas atau hutang adalah kewajiban entitas kepada suatu pihak yang belum terselesaikan, hutang adalah sumber dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas entitas dan diperoleh dari kreditur. Penyajian liabilitas terdiri dari :

- 1) Hutang
- 2) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Hutang lainnya
- 4) Hutang jangka panjang

C. Aset Neto

Pada umumnya aset neto adalah modal yang diperoleh dari aset dikurangi liabilitas. Namun, dalam laporan posisi keuangan entitas aset neto dapat dibagi menjadi :

1) Aset Neto Tanpa Pembatasan

Merupakan aset yang tidak memiliki pembatasan atas penggunaan aset tersebut. Pada umumnya aset neto tanpa pembatasan meliputi pendapatan jasa, pendapatan dari sumbangan, penjualan aset dan sejenisnya, pendapatan dari investasi, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan entitas. Batasan terhadap penggunaan aset bisa berasal dari sifat entitas nirlaba, lingkungan operasi, dan tujuan entitas yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan entitas. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Aset Neto Dengan Pembatasan

Merupakan aset yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya. Misalnya, pemberian tanah atau bangunan, karya seni, dan sesuatu yang diberikan dengan tujuan tertentu untuk dirawat dan tidak dijual.

Terdapat ada dua format yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, yaitu :

- 1) Format A secara terpisah menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari para pemberi dana. Namun, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas merincikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut berdasarkan kelas aset netonya.

- 2) Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif secara terpisah. Informasi penghasilan komprehensif lain tersebut disajikan oleh entitas berdasarkan dengan kelas aset netonya. Misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikannya mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain dalam kelas aset neto dengan pembatasan.

Gambar 2.1 Contoh Laporan Posisi Keuangan Format A

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Aset Lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Aset Tidak Lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Liabilitas	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif lain*)	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Aset Neto	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

A

Gambar 2.2 Contoh Laporan Posisi Keuangan Format B

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Aset Lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Aset Tidak Lancar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Total Liabilitas	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**)</i>	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Aset Neto	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

B

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai keuntungan atau kerugian entitas dalam periode waktu tertentu, yang didalamnya juga terdapat penghasilan dan beban dalam satu periode. Informasi dalam laporan ini dapat digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, untuk membantu para pemberi dana, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk :

- a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode
- b. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa
- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer

Terdapat ada dua format yang disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif, yaitu :

- 1) Format A menyajikan informasi dengan bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan entitas dalam penyusunan laporan penghasilan komprehensif.
- 2) Format B menyajikan informasi berdsarakan dengan klasifikasi aset neto.

Gambar 2.3 Contoh Laporan Penghasilan Komperhensif Format A

ENTITAS XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	Xxxx	Xxxx
Jasa layanan	Xxxx	Xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	Xxxx	Xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	Xxxx	Xxxx
Lain-lain	____ xxxx	____ xxxx
Total Pendapatan	____ xxxx	____ xxxx
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	Xxxx	Xxxx
Jasa dan profesional	Xxxx	Xxxx
Administratif	Xxxx	Xxxx
Depresiasi	Xxxx	Xxxx
Bunga	Xxxx	Xxxx
Lain-lain	____ xxxx	____ xxxx
Total Beban (catatan E)	____ xxxx	____ xxxx
Kerugian akibat kebakaran	____ xxxx	____ xxxx
Total Beban	____ xxxx	____ xxxx
Surplus (Defisit)	____ xxxx	____ xxxx
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	Xxxx	Xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	____ xxxx	____ xxxx
Total Pendapatan	____ xxxx	____ xxxx
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	____ xxxx	____ xxxx
Surplus (Defisit)	____ xxxx	____ xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	____ xxxx	____ xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	____ xxxx	____ xxxx

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset neto tanpa pembatasan dari para pemberi dana dan aset neto dengan pembatasan dari para pemberi dana. Didalamnya terdapat informasi tentang pembebasan aset dengan batasan jika ada. Contoh laporan perubahan aset neto dapat dilihat pada gambar 2.5

Gambar 2.5 Contoh Laporan Perubahan Aset

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	<u>xxxx</u>	xxxx
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
 <i>Penghasilan Komprehensif Lain</i>		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***)	<u>xxxx</u>	xxxx
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Total	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
 ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	<u>(xxxx)</u>	(xxxx)
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
 TOTAL ASET NETO	 xxxx	 <u>xxxx</u>

4. Laporan Arus Kas

Bertujuan menyajikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Menurut SAK ETAP, didalam laporan arus kas terdapat beberapa informasi mengenai :

1) Arus kas dari operasional

Arus kas dari operasional mengenai pembelian dan penjualan produk atau barang dan jasa, termasuk penagihan pelanggan, pembayaran kepada pemasok atau karyawan dan pembayaran seperti sewa, pajak, dan bunga. Contoh-contoh arus kas dari operasional yang terdapat pada entitas berorientasi nonlaba, sebagai berikut :

- a. Pemasukan kas dari hasil penjualan barang dan jasa
- b. Pemasukan kas dari donatur
- c. Pemasukan kas dari piutang
- d. Pengeluaran kas untuk kepentingan karyawan
- e. Pemasukan dan pengeluaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya.

2) Arus kas dari investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mengenai perolehan dan penjualan aset jangka panjang untuk berbagai investasi jangka panjang. Contoh-contoh arus kas dari investasi, sebagai berikut :

- a. Pengeluaran kas atas pembelian aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain, dan termasuk untuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi serta aset tetap yang dibangun sendiri.
- b. Pemasukan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud serta aset jangka panjang lain.
- c. Pengeluaran dan pemasukan kas untuk membeli atau menjual instrumen uang atau instrumen ekuitas lain serta kepemilikan dalam ventura bersama.
- d. Pemasukan kas dari pembayaran uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
- e. Pemasukan yang berhubungan dengan *future contracts*, *option contracts*, dan *swap contracts* kecuali kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan

atau diperjanjikan, atau pembayaran tersebut diklasifikasikan atas aktivitas pendanaan.

3) Arus kas dari pendanaan

Arus kas dari pendanaan mengenai pemasukan kas dari para pemberi dana yang tidak mengharapkan imbalan yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang, penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap serta peningkatan dana abadi, imbal hasil dan dividen yang penggunaannya dibatasi dalam waktu jangka panjang. Contoh-contoh arus kas dari pendanaan, sebagai berikut :

- a. Pemasukan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.
- b. Pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham kepada pemilik.
- c. Pemasukan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Pelunasan pinjaman.
- e. Pemabayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi nominal kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Contoh laporan arus kas dapat dilihat pada gambar 2.6

Gambar 2.6 Contoh Laporan Arus Kas Metode Langsung

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Bunga yang diterima	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	xxxx	xxxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan, pendukung, serta penunjang atas laporan keuangan pokok yang memudahkan pengguna laporan keuangan untuk membacanya. Salah satu contoh yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah adanya pemberian dari donatur dalam bentuk non tunai.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambaran mengenai pembahasan penelitian ini dijelaskan pada kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual

